



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)

UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUSTAQIM
2. Jabatan : KEPALA
3. NHK : 814031

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 935.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 172 m2/172 m2 di KAB / KOTA KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah Seluas 720 m2 di KAB / KOTA PATI, Rp. 200.000.000
3. Tanah Seluas 170 m2 di KAB / KOTA KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 173 m2/155 m2 di KAB / KOTA PATI, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
5. Tanah Seluas 2.176 m2 di KAB / KOTA PATI, Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 105.000.000

1. MOBIL, HONDA MOBILIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 93.101.131

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.133.101.131

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.133.101.131

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.